

# Draft Laporan Akhir



# Kajian Museologis Museum MH. Thamrin 2019

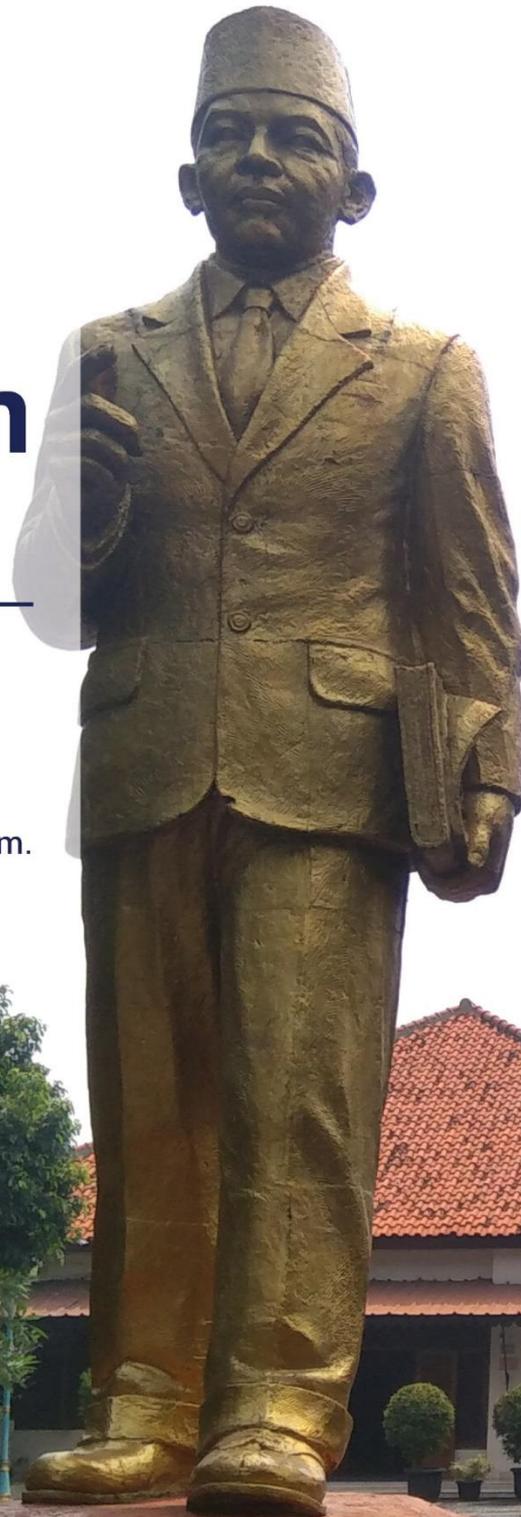
## Tim Penyusun:

Ahmad Zuhdi 'Allam, S.T., M.Hum.

Dian Sulistyowati, S.Hum., M.Hum.

Noor Fatia Lastika, S.Hum., M.Hum.

R. A. Ginanjar Purnawibawa, S.Hum., M.Hum.



MOHAMMAD HOESNI THAMRIN  
1894-1941



MUSEUM KESEJARAHAN JAKARTA

## **KAJIAN MUSEOLOGIS MUSEUM MH. THAMRIN**

*DRAFT LAPORAN AKHIR*

TIM PENYUSUN:

Ahmad Zuhdi Allam, S.T., M.Hum.

Dian Sulistyowati, S.Hum., M.Hum.

Noor Fatia Lastika, S.Hum., M.Hum.

R. A. Ginanjar Purnawibawa, S.Hum., M.Hum.

2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya Draft Laporan Akhir pekerjaan Kajian Museologis Museum MH. Thamrin ini dapat terselesaikan.

Draft laporan ini tersusun atas lima bab: Pendahuluan, Perencanaan Museum, Gambaran Data, Tata Pamer Museum MH. Thamrin, dan Penutup. Bab Pendahuluan secara umum memberikan gambaran mengenai latar belakang diadakan kegiatan ini, sekaligus pendetailan kerangka bekerja tim. Bab Perencanaan Museum menjelaskan sisi teoretis dari perencanaan museum, pengembangan fungsi museum, dan aspek fisik dari museum, khususnya yang terkait dengan tata pameran. Bab Gambaran Data memaparkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam kajian museologis Museum MH. Thamrin, antara lain aspek pengelolaan museum, aspek fisik museum, dan kisah hidup MH. Thamrin yang menjadi inspirasi berdirinya museum ini. Bab Tata Pamer Museum MH. Thamrin merupakan hasil analisis kami terkait gambaran data yang diejawantahkan dalam konten tata pameran, konsep tata pameran, dan kriteria perancangan tata pameran.

Semoga Draft Laporan ini dapat menjadi bahan diskusi untuk menciptakan tata pameran Museum MH. Thamrin yang lebih kekinian dan komprehensif agar nilai-nilai perjuangan M.H. Thamrin tidak lekang dimakan zaman. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Juli 2019

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai ruang publik, museum tidak bisa terlepas dari perkembangan masyarakat dan teknologi. Pengelola museum perlu secara terus menerus memperbarui dirinya, baik dalam urusan tata pameran maupun tata kelola, agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman ini sejatinya upaya pengelola museum agar fungsi pendidikan museum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Di era teknologi informasi saat ini, tata pameran museum perlu dibuat menarik dan semudah mungkin diterima oleh masyarakat. Banyak museum kelas dunia yang telah memanfaatkan beragam bentuk teknologi sebagai alat untuk menyampaikan narasi dalam tata pameran. Semakin murah dan mudahnya produk teknologi membuat pengelola museum memiliki banyak opsi dalam menerapkan teknologi mana yang paling tepat guna dalam tata pamernya.

Di sisi lain, perkembangan teknologi telah mendorong perputaran informasi yang begitu cepat, masif, dan kompleks. Efek negatif yang perlu diantisipasi adalah muncul dan berkembangnya informasi yang tidak tepat dan cenderung menyesatkan. Dengan demikian, kebutuhan akan pengetahuan sejarah yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi semakin urgen. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menyimpan dan memproduksi ilmu pengetahuan, museum perlu bersifat agresif dalam memoderasi perputaran informasi yang ada di masyarakat.

Sebagai museum kesejarahan yang telah lama berdiri di DKI Jakarta, Museum MH. Thamrin berpotensi sekaligus bertanggung jawab untuk menjawab kedua tantangan yang telah dipaparkan di atas. Potensi kesejarahan yang dimiliki oleh museum ini dapat dilihat pada bangunan museum itu sendiri dan koleksi yang dimilikinya. Lebih dari itu, lokasi museum yang berada di tengah permukiman masyarakat di pusat kota merupakan potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Mengingat museum ini didirikan pada bekas properti milik Muhammad Husni Thamrin (1894-1941) dan mengemban nama Pahlawan Nasional ini, maka promosi nilai-nilai kebangsaan dan kemandirian yang diperjuangkan oleh MH. Thamrin secara inheren

menjadi tanggung jawab Museum MH. Thamrin. Nilai-nilai perjuangan yang masih relevan hingga masa kini tersebut perlu digali dan dikaji melalui kiprah MH. Thamrin yang bisa disajikan dalam tata pameran museum ini.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Museum MH. Thamrin, UPT Museum Kesenjajaran Jakarta sebagai pengelola Museum MH. Thamrin mengadakan kajian perencanaan tata pameran Museum MH. Thamrin Tahun Anggaran 2019. Dengan diadakannya kajian ini, diharapkan tata pameran Museum MH. Thamrin menjadi lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi kesejarahan yang kredibel dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dilaksanakannya kajian ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 tentang Museum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Kurator Museum
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 322 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Museum Kesenjajaran Jakarta.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan kajian tata pameran Museum MH. Thamrin adalah “menghasilkan kajian tata pameran Museum MH. Thamrin yang baru, merespons perkembangan zaman, dan kredibel untuk dijadikan acuan pengembangan tata pameran Museum MH. Thamrin.”

Adapun tujuannya adalah:

1. Menghasilkan alur cerita museum yang komprehensif, meliputi sejarah MH. Thamrin dan gedung Museum MH. Thamrin.
2. Menghasilkan konsep tata pameran yang efektif, efisien, dan bisa dijadikan acuan bagi pengembangan fisik tata pameran Museum MH. Thamrin
3. Menghasilkan rekomendasi terkait akuisisi koleksi guna menyempurnakan tata pameran Museum MH. Thamrin terkini.

#### **1.4. Sasaran**

Sasaran dari dilaksanakannya kajian tata pameran Museum MH. Thamrin adalah

1. Tersusunnya alur cerita museum MH. Thamrin baru.
2. Tersusunnya konsep tata pameran Museum MH. Thamrin yang baru.
3. Tersusunnya kriteria pengembangan fisik tata pameran Museum MH. Thamrin.

#### **1.5. Luaran**

Luaran dari hasil kajian ini adalah laporan kajian tata pameran yang mencakup hasil kajian perencanaan tata pameran dan kajian perancangan tata pameran Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan fisik tata pameran MH. Thamrin di tahap selanjutnya.

#### **1.6. Tahap Kajian dan Lingkup Pekerjaan**

Kajian ini meliputi penelitian, diskusi dan perumusan tata pameran baru di Museum MH. Thamrin yang akan dilakukan oleh tim berisi Ahli Kajian Museum, Ahli Sejarah, Ahli Manajemen Sumber Daya Budaya, dan Ahli Arsitektur (*Team Leader*). Tahap pelaksanaan kajian ini adalah:

1. Studi Pustaka
2. Survei Lapangan
3. Korespondensi dengan pengelola Museum MH. Thamrin.
4. Merumuskan Ide dan Konsep Isi Museum
5. Mendiskusikan Hasil Perumusan
6. Menyusun naskah kajian yang akan menjadi acuan untuk merencanakan tata pameran baru Museum MH. Thamrin.

## BAB II

### PERENCANAAN MUSEUM

#### 2.1. Definisi dan Fungsi Museum Terkini

Kajian museologis Museum MH. Thamrin ini disesuaikan dengan pergeseran perspektif museologi yang sebelumnya berorientasi kepada koleksi kemudian bergeser pada kebutuhan masyarakat. Pergeseran perspektif itu terlihat pada definisi museum menurut ICOM (International Committee of Museums). Menurut ICOM, museum adalah “lembaga permanen *non-profit* yang terbuka untuk umum guna melayani dan membantu perkembangan masyarakat dengan mengumpulkan, merawat, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan pusaka umat manusia dan lingkungannya – baik yang bendawi maupun non-bendawi – untuk tujuan pendidikan, pembelajaran, dan rekreasi”. Pengertian ini merupakan hasil kesepakatan museum-museum sedunia yang tergabung dalam ICOM pada tahun 2007 di Vienna.<sup>1</sup>

Perspektif museologi sendiri berkembang dari masa ke masa. Di abad ke-19 – saat museum mulai dibuka untuk publik – museum adalah bagian vital dari industrialisasi dan kolonialisme Eropa. Perspektif yang dipakai di kebanyakan museum saat itu bertujuan untuk mempromosikan hasil dari dominasi negara-negara kolonial atas wilayah jajahannya (lewat koleksi etnografi) atau memamerkan hasil dari dominasi manusia atas alam (lewat koleksi biologi dan geologi). Koleksi disusun untuk membuat publik, utamanya kelas menengah, agar kagum atas keragaman dunia sehingga pada akhirnya mereka akan menghormati pencapaian negaranya. Pada era yang sama, museum milik pribadi juga tumbuh dan berkembang karena dianggap sebagai pencapaian personal bagi empunya (Barrett, 2011).

Di akhir abad ke-19, museum telah berkembang menjadi institusi yang mapan dan semangat profesionalisme pengelolaan museum telah melahirkan kurator sebagai pekerja museum. Peter van Mensch (1992 & 2004) menyebut kelahiran kurator profesional sebagai tanda dari “revolusi museum pertama”. Perspektif museologi revolusi pertama menekankan peran kurator yang sangat besar atas museum. Kurator adalah ahli spesialis

---

<sup>1</sup> ICOM Statute 2007.

yang memegang otoritas penuh atas koleksi yang selama beberapa dekade berikutnya merupakan “pemain tunggal” di museum (Heumann-Gurian, 2010).

Peran museum yang semakin besar dalam pendidikan masyarakat mendorong lahirnya “revolusi kedua museum” pada dekade 1960-an. Revolusi ini menggeser fungsi tradisional museum ke arah fungsi sosial, dalam pendidikan maupun kebudayaan, yang universal dan dinamis. Pada 1974, Konferensi Umum ICOM di Kopenhagen mendorong agar museum melakukan transformasi berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan koleksinya (van Mensch, 1992 & 2004). Resminya fungsi edukasi museum ini telah membuat museum terpapar dengan dinamika politik global, perkembangan kapitalisme, kemunduran nilai-nilai kolonialisme, dan perkembangan filsafat pascamodern yang pada akhirnya mendorong museum untuk terus bertransformasi (Merriman, 1989; Shanks, 2005; Barrett, 2011; Magetsari, 2016). Lalu, semakin banyak cendekia yang mendorong perubahan cara museum berhubungan dengan masyarakat. Pendekatan dengan masyarakat yang bersifat monolog perlu digeser menjadi lebih resiprokal. Resiprokalitas ini kemudian dikenal dengan perspektif “museologi baru” yang memacu museum untuk lebih berorientasi kepada masyarakat, berbicara lewat aksi, dan mencurahkan dirinya kepada perubahan dan pengembangan sosial (McCall & Gray, 2014).

Kompleksitas fungsi kurator dan hubungan museum – masyarakat karena berkembangnya perspektif “museologi baru” memicu munculnya “revolusi ketiga museum” pada dekade 1990-an. Pada masa ini, aspek manajemen museum menjadi penting dan mulai banyak dibahas dalam diskursus museologi. Selain aspek manajemen, aspek ekonomi/bisnis dalam praktik permuseuman juga mulai diperhatikan dalam rangka menjawab tantangan bagi museum agar menjadi institusi yang berkelanjutan (van Mensch, 2004).

Definisi museum menurut ICOM 2007 yang telah disampaikan di atas sejatinya dibuat dalam perspektif museum revolusi ketiga. Berdasarkan definisi tersebut, ICOM merumuskan beberapa fungsi museum, antara lain:

1. Mengumpulkan dan pengamanan warisan alam dan budaya
2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah
3. Konservasi dan preservasi
4. Pengenalan kebudayaan antardaerah dan antarbangsa
5. Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum
6. Pengenalan dan penghayatan kesenian
7. Visualisasi warisan alam dan budaya

8. Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia
9. Pembangkit rasa bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan YME

Tidak jauh berbeda dengan definisi museum yang disepakati oleh ICOM, definisi museum di Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) no. 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah “lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat” (Bab I, Pasal 1, Butir 1). Dari pengertian ini bisa dilihat bahwa secara umum museum memiliki kegiatan-kegiatan: i) melindungi koleksi, ii) mengembangkan koleksi, iii) memanfaatkan koleksi, dan iv) mengomunikasikan koleksi kepada masyarakat. Peraturan pemerintah ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

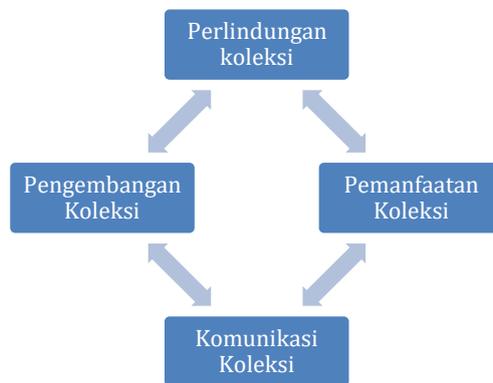


Diagram 1. Kegiatan museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 66 tahun 2015.

Lebih dari itu, pemanfaatan yang dimaksud dalam PP RI no. 66 tahun 2015 tentang Museum adalah tiga fungsi museum yang disebutkan di dalam definisi menurut ICOM, yakni fungsi pelayanan untuk tujuan pendidikan (*education*), penelitian (*research*), dan kesenangan (*enjoyment*). Tiga kata kunci tersebut sebenarnya dapat menjelaskan fungsi museum dewasa ini. Museum ada untuk membuat masyarakat yang menjadi pengunjung museum mendapatkan pendidikan yang sifatnya menyenangkan, yang tentunya tidak mereka dapatkan ketika mereka mengunjungi tempat hiburan lain, seperti mal, bioskop, taman hiburan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, museum-museum dewasa ini mulai mengembangkan konsep *edutainment*, di mana pengunjung bisa mendapatkan *education*

(pendidikan) sekaligus *entertainment* (hiburan). Pendidikan dan hiburan dalam hal ini muncul sebagai hubungan simbiosis yang unik di dalam museum.

Adapun kegiatan yang diamanatkan kepada pemilik/pengelola museum, antara lain:

- Pengelolaan Koleksi (Bab IV, Pasal 13-31)
  - Pengelolaan Administrasi Koleksi (Pasal 14-Pasal 22)
  - Pengadaan dan Pencatatan Koleksi (Pasal 15-Pasal 17)
  - Penghapusan dan Pengalihan Koleksi (Pasal 18 dan Pasal 19)
  - Peminjaman Koleksi (Pasal 20-Pasal 22)
  - Teknis Koleksi (Pasal 23-Pasal 31)
  - Penyimpanan (Pasal 24-Pasal 28)
  - Pemeliharaan (Pasal 29-Pasal 31)
- Pengamanan Museum (Bab V, Pasal 32-33)
- Pengembangan (Bab VI, Pasal 34-Pasal 43)
  - Pengkajian (Pasal 34-Pasal 38)
  - Kerja Sama (Pasal 39-Pasal 40)
- Pemanfaatan (Bab VIII, Pasal 41-Pasal 43)
- Pendanaan (Bab IX, Pasal 48-Pasal 51)

## **2.2. Museum sebagai Pusat Pembelajaran dan Kegiatan Masyarakat**

Berkembangnya perspektif “museologi baru” melahirkan semakin banyak cendikia yang mendorong perubahan cara museum berhubungan dengan masyarakat. Pendekatan museum kepada masyarakat yang bersifat monolog perlu digeser menjadi lebih resiprokal. Perspektif “museologi baru” memacu museum untuk lebih berorientasi kepada masyarakat, berbicara lewat aksi, dan mencurahkan dirinya kepada perubahan dan pengembangan sosial (McCall & Gray, 2014). Menurut McCall & Gray (2014), berkembangnya perspektif “museologi baru” berdampak pada perubahan “nilai-nilai, makna, kontrol, interpretasi, otoritas, dan otensitas” dalam museum. Implikasi praksis dari penerapan perspektif museologi ini adalah distribusi ulang kuratorial (*curatorial redistribution*) (Stam, 1993) dan penyediaan peran yang lebih aktif untuk masyarakat, baik sebagai pengunjung dan pengendali fungsi kuratorial (Black dalam McCall & Gray, 2014; Krepes, 2009). Mason, dkk. dalam Viau-Courville (2017) melihat bahwa penerapan perspektif “museologi baru” melahirkan partisipasi komunitas yang mengganti proses kuratorial tradisional di museum. Sebaliknya, Longair (2015) melihat bahwa keterbukaan

dalam proses kuratorial menyiratkan filsafat dan praksis dari perkembangan perspektif “museologi baru”. Di museum yang memakai perspektif “museologi baru” masyarakat bukan lagi sekadar audiens, melainkan juga kolaborator museum (Wronska-Friend, 2012) yang, menurut Simon (2010), perlu terlibat dalam perencanaan museum.

Berdasarkan pemaparan di atas dan pada bagian sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa terjadi pergeseran fungsi museum menjadi tempat yang lebih terbuka bagi masyarakat. Keterbukaan museum kepada masyarakat ini bisa terwujud melalui kegiatan edukasi dan penelitian yang ada di museum.

Menurut Cornelia Brüninghaus-Knubel (2004), kegiatan edukasi tidak bisa dipisahkan dari museum. Ketika museum dibuka untuk publik, museum sadar atau tidak telah melakukan kegiatan edukasi. Untuk menyampaikan makna dari koleksi di museum dan meningkatkan pemahaman pengunjung, beragam metode edukasi bisa diterapkan di museum. Beberapa metode dan media ditujukan bagi pengunjung yang memilih untuk bersikap pasif, metode dan media lain menuntut pengunjung untuk bersikap aktif. Brüninghaus-Knubel mengidentifikasi beberapa metode dan media dalam edukasi di museum:

- Label koleksi,
- Tur berpemandu,
- Pemandu audio/audiovisual,
- Ruang edukasi/Ruang anak,
- Peraga atau media Interaktif,
- Teater,
- Sanggar kerja,
- Peragaan edukatif,
- Bantuan/Pameran taktil untuk tunanetra,
- *Education Kit*,
- Publikasi museum, misalnya brosur atau buku,
- Museum keliling, dan
- Kegiatan khusus, misalnya pelatihan, seminar, bincang-bincang, atau diskusi.

Terkait kegiatan penelitian, sejak awal perkembangannya, lembaga museum tidak dapat dipisahkan dengan ciri ilmiah yang merupakan atribut kelembagaan museum. Kegiatan penelitian di museum penting untuk menjamin suksesnya fungsi operasional museum. Menurut Ghautama dan Prioyulianto (ed.) (2012), penelitian di museum dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian koleksi museum. Penelitian di museum umumnya berbentuk penelitian koleksi (Ladkin, 2004; dan Ghautama dan Prioyulianto (ed.), 2012); penelitian pameran (Herreman, 2004); penelitian pengunjung (Woollard, 2004; Mork, 2004; dan Ghautama dan Prioyulianto (ed.), 2012); penelitian manajemen/organisasi museum (Edson, 2004; dan Ghautama dan Prioyulianto (ed.), 2012). Penelitian yang dilakukan haruslah sejalan dengan visi dan misi museum. Dalam melakukan penelitian, museum dapat bekerja sama dengan museum lain, universitas, atau instansi lain yang relevan (Ghautama dan Prioyulianto (ed.), 2012).

Sebagai upaya untuk mendekatkan masyarakat kepada museum, pengelola museum perlu memberi perhatian lebih pada kegiatan hubungan masyarakat. Secara umum, hubungan masyarakat diartikan sebagai “sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara semua organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (*mutual understanding*)” (Jefkins dalam Yulianto, 2016). Dalam praktiknya, hubungan masyarakat dalam museum bisa terlihat dari penerbitan media komunikasi museum, seperti jurnal internal museum, publikasi (brosur dan leaflet), laporan atau hasil penelitian, profil museum, situs, media sosial, seri bacaan, dan lain-lain. Kegiatan hubungan masyarakat bisa juga berbentuk acara, seperti talkshow atau diskusi. Selain itu, salah satu contoh kecil dari pengelolaan hubungan masyarakat yang baik adalah adanya papan pengumuman dan kotak saran di museum atau narahubung museum (Yulianto, 2016). Lebih dari itu, keterlibatan museum dalam asosiasi museum bisa menjadi tolok ukur bagaimana hubungan masyarakat museum bekerja.

Hubungan masyarakat yang baik perlu dimulai dengan identifikasi pengunjung museum yang baik. Menurut Falk dalam Yulianto<sup>2</sup>, ada lima tipe pengunjung museum, yaitu 1) *explorer*, 2) *experience seeker*, 3) *facilitator*, 4) *professional/hobbyist*, dan 5) *rechargers*. *Explorer* berusaha mencari kepuasan dan keingintahuan intelektual di lingkungan yang baru. *Facilitator* mencari pengalaman sosial yang bermakna untuk orang-orang dekatnya di lingkungan yang menurutnya menarik. *Experience seeker* berusaha untuk menemukan ide-ide dan hal-hal terbaik dalam perjalanannya. *Professional/hobbyist* memiliki keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut hal-hal yang ia sukai. *Recharger* memulihkan dirinya, baik secara fisik, intelektual, dan emosional di tempat yang menurutnya indah atau segar.

---

<sup>2</sup> Sumber: Yulianto, Kresno. 2016. *Di Balik Pilar-pilar Museum*. Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan pemasaran di museum menjadi tak terelakkan. Banyak literatur yang menyediakan kerangka kerja kegiatan pemasaran museum (lihat Kotler, Kotler, and Kotler, 2008). Kegiatan pemasaran museum tidak hanya diartikan sebagai 'menjual' jasa edukasi yang ditawarkan oleh museum, tapi juga sebagai upaya untuk mendorong sebanyak-banyaknya masyarakat agar datang ke museum. Selain itu, pemasaran museum masa kini bersifat 'relasional' yang mendorong agar masyarakat memiliki hubungan yang resiprokal dengan museum yang tercermin dari intensitas berkunjung yang tinggi: pengunjung yang loyal kepada museum. Lebih dari itu, pemasaran yang baik juga menuntut terbentuknya *brand* museum, suatu konsep tentang asosiasi kualitas museum dengan karakter tertentu oleh masyarakat (Mork, 2004).

Pemasaran museum yang baik, menurut Kotler, Kotler, dan Kotler (2008), perlu direncanakan secara strategis. Perencanaan pemasaran museum strategis terdiri atas beberapa kegiatan, yakni identifikasi kekuatan dan kelemahan museum, analisis kondisi eksternal museum, pembuatan segmentasi dan target audiens, perencanaan promosi, dan evaluasi. Mork (2004) mendorong agar museum membuat segmentasi pengunjung museum berdasarkan perbedaan geografis, demografis, psikologis, dan *organizational* (kedekatan institusional dengan museum), sementara target audiens museum yang potensial adalah keluarga, industri pariwisata, peziarah, sekolah/perguruan tinggi, dan sponsor. Mork juga menyarankan agar museum melakukan kegiatan promosi melalui iklan, hubungan masyarakat, pers, pemasaran langsung, dan internet.

### **2.3. Perencanaan Tata Pamer Museum**

Pameran dalam museum diartikan sebagai kegiatan museum dalam upaya menampilkan koleksinya kepada audiens. Belcher dalam Herreman (2004) membagikan pameran ke dalam dua tipe: pameran permanen dan pameran temporer. Meski disebut sebagai "permanen", pameran permanen lazimnya diganti setidaknya setiap lima tahun. Adapun Belcher membagi pameran temporer menjadi tiga tipe: pameran jangka pendek (1-3 bulan), pameran jangka menengah (3-6 bulan), dan pameran jangka panjang (lebih dari 6 bulan). Terdapat juga bentuk pameran lain, yakni pameran keliling yang dilakukan di luar museum. Untuk mengadakan suatu pameran, terdapat lima tahap yang perlu dilaksanakan oleh museum: i) perencanaan, ii) penelitian/interpretasi, iii) perancangan, iv) produksi, dan v) instalasi. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain tujuan pameran, audiens target, dan feasibility (termasuk di

dalamnya aspek konservasi koleksi). Lebih dari itu, evaluasi atas pameran pun perlu dilakukan agar proses edukasi dan komunikasi museum bisa terukur (Herreman, 2004).

Menurut Mark Walhimer<sup>3</sup>, perancangan tata pameran museum terdiri atas beberapa tahap: i) perencanaan, ii) perancangan, iii) fabrikasi, dan iv) instalasi pameran. Dalam kajian tata pameran ini, tahap yang akan dibahas adalah perencanaan dan perancangan tata pameran museum. Pada tahap perencanaan, terdapat beberapa pertimbangan yang bisa membuat perencanaan tata pameran museum menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Pertimbangan tersebut, antara lain:

1. **Identifikasi pengunjung museum.** Perbedaan tipe pengunjung berpengaruh besar dalam perencanaan tata pameran, termasuk penggunaan media, pemakaian gaya bahasa pada narasi, dan – bahkan – palet warna/*mood* ruang suatu ruang pameran. Lebih dari itu, karakter pengunjung bisa membantu dalam mengidentifikasi level informasi apa yang ingin disajikan dalam tata pameran museum.
2. **Kondisi ruang museum.** Sebagai sebuah bangunan, museum tersusun atas ruang-ruang yang memiliki karakteristik arsitektural tertentu. Karakter tersebut bisa berupa kondisi fisik (material dinding, lantai, dsb.) atau kondisi spasial (luas ruang, ketinggian ruang, dsb.). Kondisi ruang juga termasuk hubungan antarruang: apakah bersebelahan atau terpisahkan oleh ruang luar. Karakter-karakter tersebut tentu mempengaruhi perencanaan tata pameran museum.
3. **Konten yang dipamerkan.** Faktor ini mencakup konten museum, koleksi apa saja yang perlu dimiliki oleh museum dalam rangka mendukung penyampaian konten museum, dan bagaimana konten tersebut disampaikan dalam alur cerita museum. Dalam beberapa kasus, pengelola museum diharapkan melakukan akuisisi koleksi agar museum dapat memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi pengunjung museum.
4. **Teknis pembuatan tata pameran.** Faktor ini berisi batasan teknis terkait bentuk tata pameran sesuai dengan peraturan dan kondisi museum. Misalnya, adalah budget pembuatan tata pameran yang tersedia; peraturan atau standar terkait tata pameran atau bangunan publik yang ada di DKI Jakarta (misalnya, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung); ketersediaan sumber daya,

---

<sup>3</sup> Sumber: Walhimer, Mark. 2012. *Museum Exhibition Design – Part I*. 9 April 2012. Dapat diakses di <https://museumplanner.org/museum-exhibition-design-part-i/>. (diakses pada 30 Mei 2019)

baik manusia maupun finansial, yang dimiliki oleh Museum MH. Thamrin dan Museum Kesenjaraan Jakarta.

Masih menurut Mark Walhimer<sup>4</sup>, perancangan tata pameran museum terdiri atas sepuluh tahap, antara lain:

1. Pembuatan naskah tata pameran.
2. Pembabakan naskah tata pameran.
3. Penelitian tata pameran.
4. Pembuatan desain konseptual.
5. Pembuatan desain skematik.
6. Pengembangan desain dan media.
7. Pembuatan desain final.
8. Penunjukan rekan kontraktor pembuat tata pameran.
9. Pembuatan gambar kerja pekerjaan tata pameran.
10. Pembuatan dan pengujian purwarupa tata pameran.

Kajian tata pameran Museum MH. Thamrin ini akan memberikan hasil pada tahap pembuatan naskah tata pameran, pembabakan naskah tata pameran, penelitian tata pameran, dan pembuatan desain konseptual tata pameran.

---

<sup>4</sup> Sumber: Walhimer, Mark. 2012. *Museum Exhibition Design – Part II*. 16 April 2012. Dapat diakses di <https://museumplanner.org/museum-exhibition-design-part-ii/>. (diakses pada 30 Mei 2019)

## BAB III GAMBARAN DATA

### 3.1. Gambaran Umum Museum MH. Thamrin

#### 3.1.1. Visi dan Misi Museum MH. Thamrin<sup>5</sup>

Saat ini, Visi Museum MH. Thamrin adalah *“Menjadi museum yang representatif bagi sejarah Jakarta yang mengeksplorasi sejarah perjuangan MH. Thamrin dan menjadi kebanggaan warga Jakarta dan Indonesia.”* Adapun Misi Museum MH. Thamrin adalah

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah perjuangan M.H. Thamrin,
- Membuat pameran yang berkaitan dengan M.H. Thamrin,
- Melestarikan dan menjaga semua peninggalan M.H. Thamrin,
- Memberikan alur cerita sejarah yang tepat melalui teknologi informasi.

#### 3.1.2. Organisasi Museum

Saat ini, Museum MH Thamrin adalah bagian dari Museum Kesenjaraan Jakarta, salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

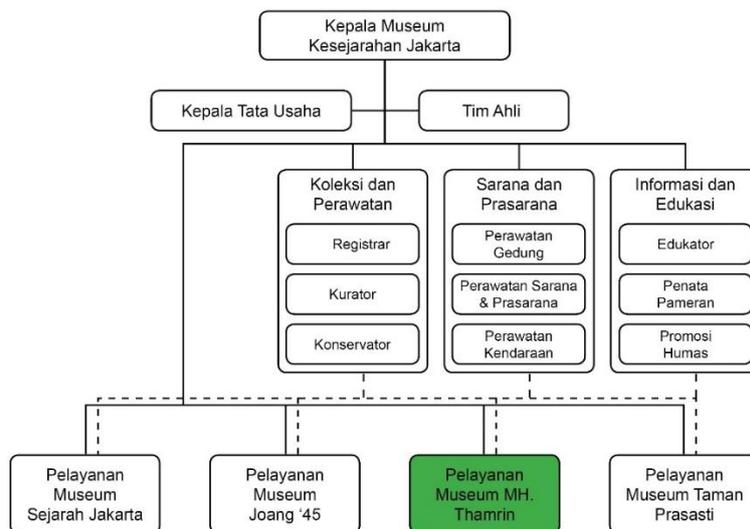


Diagram 2. Struktur Organisasi Museum MH. Thamrin.

<sup>5</sup> Sumber: Brosur Museum MH. Thamrin

Museum Kesenjaraan Jakarta dipimpin oleh satu orang Kepala yang dibantu oleh pejabat Tata Usaha yang mengurus kepegawaian, administrasi, dan surat menyurat keempat museum. Kepala dan pejabat Tata Usaha dibantu oleh tiga orang Kepala Satuan Pelaksana: Pelaksana Koleksi dan Perawatan, Pelaksana Sarana dan Prasarana, dan Pelaksana Informasi dan Edukasi. Dua orang Kepala Satuan Pelaksana tersebut bertanggung jawab atas keberjalanan keempat museum. Sementara pegawai yang khusus ditempatkan di masing-masing museum adalah Kepala Satuan Pelayanan, yang juga menaungi para pemandu (lihat Diagram 2). Saat ini (Juni 2019), Museum MH. Thamrin memiliki 10 orang karyawan dengan komposisi fungsi sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Pegawai Negeri Sipil (2 orang)
2. Pemandu (1 orang)
3. *Office Boy* (5 orang)
4. *Security* (2 orang)



Foto 1. Diskusi di Ruang Kepala Unit Pelayanan Museum MH. Thamrin.

---

<sup>6</sup> Sumber: Wawancara dengan Pengelola Museum, Ibu Novi (24 Mei 2017).

### 3.1.3. Data Kunjungan Museum

Dari buku tamu tahun 2015, 2016, dan 2017 tidak ditemukan kunjungan dalam tipe rombongan besar (lebih dari 50 orang). Hal ini sangat wajar karena jalan menuju Museum tidak bisa dilalui oleh bus. Sementara di tahun 2017, dari 138 orang pengunjung Museum, hanya 3 (tiga) orang yang berasal bukan dari wilayah Jabodetabek. Dari data yang sama, tidak ditemukan kunjungan berulang. Detail jumlah pengunjung bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Jumlah Pengunjung Museum MH. Thamrin

Tahun	Jumlah Pengunjung
2012	1.602 orang
2013	1.655 orang
2014	1.203 orang
2015	947 orang
2016	1.282 orang
2017 (Jan-Apr)	138 orang
2018	4.208 orang

### 3.1.4. Koleksi Museum

Saat ini, Museum MH. Thamrin memiliki kurang lebih 457 koleksi, antara lain.<sup>7</sup>

1. Koleksi foto reproduksi dokumentasi perjuangan MH. Thamrin, foto tokoh pejuang dan Jakarta Tempo dulu (290 foto)
2. Benda memorabilia peninggalan MH. Thamrin: lemari, meja rias, kursi tamu, radio, blangkon, piring keramik, dll. (18 benda)
3. Perangkat alat musik kebudayaan Betawi: *tanjidor* dan *gambang kromong*.
4. Lukisan potret MH. Thamrin (7 lukisan)
5. Buku dokumen pidato MH. Thamrin di *Gementraad/Volksraad* (4 buku)
6. Diorama menggambarkan kegiatan MH. Thamrin (3 diorama)
7. Buku cetakan sejarah perjuangan, dan lain-lain. (102 buku)
8. Alat transportasi tradisional (2 alat)
9. Patung HM Thamrin.

Dari ratusan koleksi tersebut, terdapat beberapa artefak asli yang terkait M.H. Thamrin, hasil sumbangan keluarga M.H. Thamrin.

<sup>7</sup> Sumber: Laporan Tahunan Pengunjung Museum MH. Thamrin.

- i. Meja Rias Marmer
- ii. Radio Merk Philip 1928
- iii. Satu set furnitur (lemari, meja kecil, meja tamu dan kursi-kursinya)
- iv. Blangkon MH. Thamrin
- v. Piring Keramik
- vi. Dipan Pembaringan

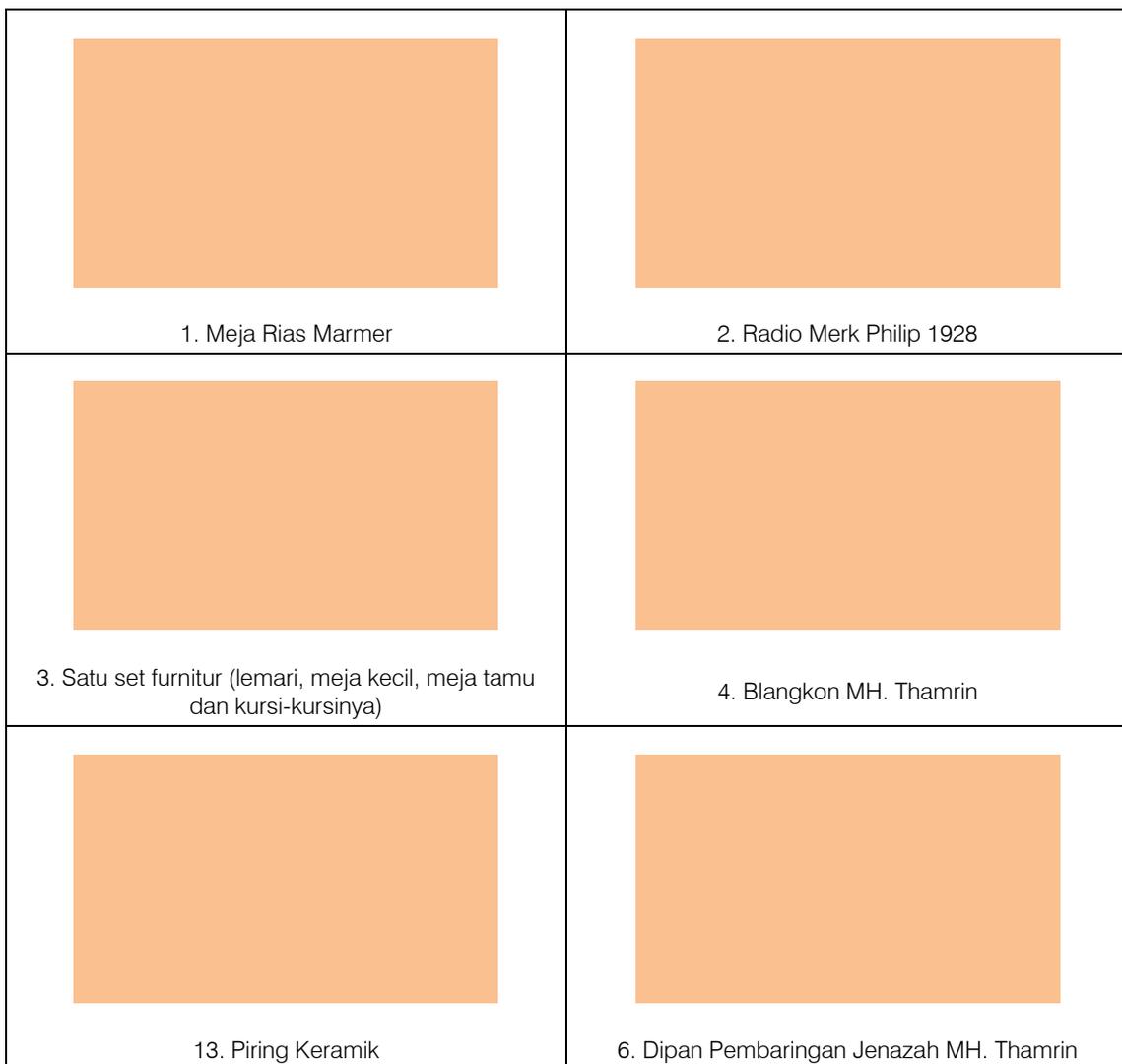


Foto 2. Foto koleksi orisinal yang berhubungan dengan kehidupan M.H. Thamrin.

### 3.1.5. Kegiatan Museum

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelola Museum MH. Thamrin telah berusaha untuk mengadakan kegiatan yang berpotensi menggaet beragam lapisan masyarakat,

utamanya anak-anak dan remaja. Selama 2018 dan 2019, tim mencatat beberapa kegiatan tersebut, antara lain:

1. Panggung Boneka “Penyerangan Mataram Tahun 1628 – 1629” yang diadakan pada 30 Maret 2018 oleh Museum Kesejarahan Jakarta dengan mengundang Dalang Ki Bendy Tosanajie dan Ki Gemblung Alex Pamungkas.



Foto 3. Materi Publikasi Acara "Panggung Boneka: Penyerangan Mataram Tahun 1628-1629" yang diadakan pada 2018.

2. “Jelajah Malam Museum” bertema “Mengenal Sosok Mohammad Hoesni Thamrin” yang diadakan pada 20 April 2018. Acara ini merupakan ajang silaturahmi Unit Pengelola (UP) Museum Kesejarahan Jakarta dengan keluarga M.H. Thamrin (Susantio, 2018);



Foto 4. Foto dokumentasi kegiatan "Jelajah Malam Museum" pada 20 April 2018.

3. Pada bulan Mei 2018, diadakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Hari Museum Internasional. Acara yang diadakan, antara lain Pameran Perjuangan Kemerdekaan M. H. Thamrin (12-22 Mei 2018), Seminar Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan M. H. Thamrin (14 Mei 2018), dan Lomba Cepat Tepat.



Foto 5. Materi Publikasi Kegiatan Museum MH. Thamrin pada Mei 2018.

4. Pada 21-22 Juli 2018, Museum Sejarah Jakarta dalam rangka menyambut Asian Games 2018 mengadakan Wisata Kampong Toea yang dimulai dari Museum MH. Thamrin. Acara dilaksanakan sejak 08.00 WIB hingga selesai.

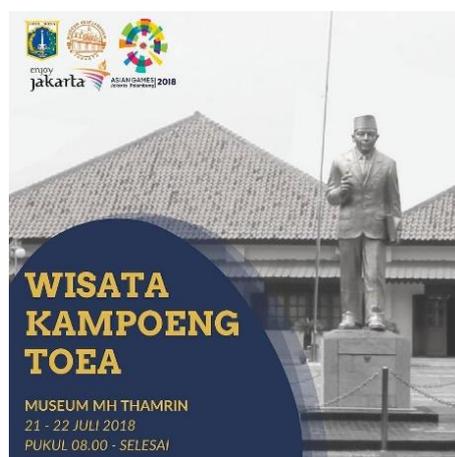


Foto 6. Materi Publikasi Kegiatan "Tur Wisata Kampong Toea" yang diadakan pada Juli 2018.

5. Rangkaian Acara “Ini Kampung” yang diinisiasi oleh Rujak Center for Urban Studies (Rujak). Dalam pelaksanaannya, Rujak bekerja sama dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota, Urban Poor Consortium, Arsitektur Swadaya dan Fasilitas, Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Indonesia, Komunitas Bambu, serta didukung oleh Museum MH Thamrin dan Friedrich Ebert Stiftung. Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019. Acara yang diselenggarakan di dalam kegiatan ini antara lain pameran, tur, pertunjukan kesenian dan diskusi (Pudjiyanto, 2018);



Materi Publikasi Kegiatan “Ini Kampung”

Diskusi pada acara “Ini Kampung”

Foto 7. Dokumentasi Kegiatan "Ini Kampung yang diselenggarakan di Museum MH Thamrin".

6. Dalam rangka memperingati ulang tahun M.H. Thamrin, pada awal 2019 diselenggarakan “Festival Museum M.H. Thamrin 2019”. Beberapa acara yang diadakan dalam rangka festival ini antara lain Lomba Vlog untuk HPI & Pelajar, Lomba Paduan Suara untuk SMA, Lomba Silat untuk Sanggar Silat se-Jakarta, Lomba Tari Kreasi Betawi untuk RPTRA se-Jakarta, dan Seminar “Perkoempoelan Kaoem Betawi 1923-1942: Betawi & Keindonesiaan”. Acara ini diadakan oleh Museum Kesenian Jakarta sebagai organisasi induk Museum MH. Thamrin. Festival ini dalam pengamatan tim merupakan upaya menghidupkan lagi kegiatan “Pekan MH. Thamrin” yang pernah dilakukan oleh pengelola museum pada 2010, 2011, dan 2014.



Foto 8. Materi publikasi "Festival Museum MH Thamrin" yang diadakan pada 2019.

7. Sebagaimana pada 2018, pada 2019 dilaksanakan pula acara panggung seni boneka: "Panggung Seni Boneka Sejarah Jakarta". Pada 2019, tema yang diangkat lebih beragam, antara lain "Perjuangan Bapak M.H. Thamrin", "Perjuangan Diponegoro", "Penyerahan Mataram ke Batavia", "Pieter Erberveld", "Detik-detik Proklamasi", "Penyerangan Jayakarta ke Benteng VOC", "Surawisesa", dan "Fatahillah". Acara ini dilaksanakan pada 24 Juni 2019.



Foto 9. Materi publikasi "Panggung Seni Boneka Sejarah Jakarta" yang diadakan pada 2019.

8. Pada 3 dan 4 Agustus 2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Jakarta Museum Marathon atau JMM Smart Race 2019 dalam rangka mempromosikan museum yang ada di Jakarta dengan menggabungkan olahraga dan wisata (*sport tourism*). Salah satu museum yang akan menjadi titik berhenti peserta maraton adalah Museum MH. Thamrin (Nur Ichsan, 2019).

### 3.2. Sejarah Hidup MH. Thamrin

Mohammad Husni Thamrin, lahir pada 16 Februari 1894, adalah putra dari Thamrin Mohammad Thabrie, seorang Bumiputera yang termasuk pada golongan neo-priyayi pada masa itu. Thamrin adalah seorang *Wethouder* (Badan Pengurus Harian) dari Batavia yang tinggal di Weltevreden (pinggiran Batavia). Ia lahir di keluarga yang bangkit status sosial, ekonomi, dan politiknya dari masa politik etis, yaitu ketika golongan priyayi mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Hering, 2003).

Keluarganya Thamrin pada awalnya merupakan golongan priyayi rendah (*lower-ranked priyayi*), yang kemudian dalam perkembangannya mengalami kenaikan kedudukan menjadi golongan *neo-priyayi* atau priyayi baru. Terkait dengan status keluarga Thamrin yang dapat dikatakan tinggi tersebut, sesungguhnya diawali oleh Mr. Ort yang merupakan buyut Thamrin. Mr. Ort adalah seorang pemilik *Hotel Ort* di Molenvliet-West, Batavia, yang menikahi seorang perempuan pribumi bernama Nyai Mak Noeraini. Dari perkawinan keduanya, lahirlah anak bernama Mohammad Thabrie, yang kemudian bekerja sebagai jaksa di Pengadilan Departemen Dalam Negeri (*Binnenlands Bestuur*/BB). Selanjutnya, Mohammad Thabrie memiliki anak bernama Thamrin Mohammad Thabrie yang menjadi seorang wedana di Batavia, yang juga terkenal sebagai seorang haji dengan sebutan *Jaksa Bibit* (Hering, 2003).

Karena statusnya tersebut, Thamrin bersekolah di institusi yang berorientasi barat, seperti *Bijbelschool Pasar Baru*, *Koning Willem Drie*(KW-III), dan bahkan diganti namanya menjadi "Jacob" untuk memudahkan administrasi. Ia kemudian sempat bekerja sebagai Pegawai Magang di Kantor Residen Batavia, Juru Tulis di *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), lalu bergabung dengan Dewan Penasihat Kota Batavia (*Gemeenteraad*) selama 1919-1941, kemudian Dewan Rakyat (*Volksraad*) selama 1927-1941.

Thamrin berjasa dalam pembentukan partai politik yang beranggotakan golongan Bumiputera, termasuk juga dalam kesertaan mereka dalam menyampaikan aspirasi dalam dewan-dewan perwakilan, hingga tercipta Volksraad, suatu lembaga semi-parlemen yang anggotanya berasal dari berbagai kelompok ras di Indonesia, walaupun kekuasaannya bersifat terbatas. Thamrin masuk dari daerah pilih Batavia pada tahun 1917, dan memulai karir sosial politiknya dengan melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang menjadi cikal bakal berbagai perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pribumi.

Kiprah Thamrin dalam berorganisasi politik dimulai pada saat ia bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh ayahnya, yaitu *Perhimpoean Kaoem Betawi*, yang dibentuk pada tahun 1916 (Siswantari, 2019:6). Saat itu, ayah Thamrin merupakan seorang Wedana di Batavia. Organisasi tersebut merupakan organisasi regional yang dibentuk untuk menggabungkan aspek agama dan pendidikan rakyat Betawi, yang kemudian diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial pada 22 Desember 1923, atas peranan dan Mohammad Masserie dan Thamrin Mohammad Thabrie sendiri, sebagaimana dimuat dalam *De Javasche Courant* tanggal 4 Januari 1924.

Thamrin, melanjutkan apa yang telah dibangun Thabrie, membawa Perhimpoean Kaoem Betawi pada ruang perpolitikan nasional dengan keberadaannya di Gemeenteraad dan Volksraad, hingga akhirnya ia bergabung dengan Parindra, fusi antara *Persatuan Bangsa Indonesia* dengan *Budi Utomo*, pada tahun 1935 dan harus melepas afiliasinya dengan perhimpunan. Ia mengupayakan peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat Betawi pada khususnya, dan Masyarakat Indonesia pada umumnya, dan juga untuk mendukung pemilihan kaum pribumi di saat pemilihan anggota dewan.

Thamrin tercatat sebagai seorang tokoh penting dalam masyarakat Betawi karena pendidikan dan kedudukannya di Batavia, yaitu sebagai *Locoburgermester*, atau wakil walikota, di Gemeenteraad Batavia. Bergabungnya Thamrin dalam Gemeenteraad pun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, yaitu pertemuan dengan beberapa orang-orang sosialis, seperti Daan van der Zee, Sam Koperberg, dan E.F.E. Douwes Dekker (Sinaga, 2014).

Pada saat tergabung dalam Gemeenteraad Batavia di tahun 1923, Thamrin menyoroti buruknya kondisi kampung penduduk pribumi, termasuk pada kondisi sosial, sanitasi, drainase, distribusi beras, pasokan air bersih, serta hal-hal lain yang membatasi kesejahteraan pribumi. Caranya adalah dengan mengusulkan penyediaan dana atau anggaran yang dihimpun dari pemotongan berbagai pos lain dari anggaran dewan bagi perbaikan kampung (Siswantari, 2019:169)..

Kepiawaiannya dalam berpolitik semakin tajam ketika ia memutuskan untuk maju menjadi anggota Volksraad yang dibentuk pada tahun 1918. Sebelumnya, telah ada Dewan Kabupaten (*Regentschapraad*) dan Dewan Kota (*Gemeenteraad*). Keberadaan perwakilan pribumi dalam Volksraad dianggap telah menghadirkan kesadaran nasional di sepanjang dekade 1920-an, sehingga muncul sejumlah organisasi dan partai politik yang menyuarakan keinginan untuk berparlemen.

Namun, dewan rakyat di Hindia Belanda adalah dewan rakyat kedua setelah keberadaan dewan rakyat di Afrika Selatan (*Zuid-Afrikaansche Republiek*) yang ada sejak 1902. Volksraad, sama dengan dewan rakyat di Afrika Selatan, merupakan lembaga perwakilan unikameral (sistem satu kamar) dengan anggota 24 orang (Gillomee, 2003:166).

Berdasarkan arsip Volksraad, *Handelingen van de Volksraad*, dari berbagai periode sidang dapat diketahui peran besar Thamrin dalam mengupayakan sejumlah kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat pribumi, melalui perwakilan yang representatif dan aktif dari fraksi Bumiputera. Peran-peran Thamrin di Volksraad dijabarkan sebagai berikut (*Handelingen van de Volksraad*):

- Volksraad 1927-1928
  - Thamrin pertama kali masuk ke Volksraad sebagai Perwakilan Golongan Bumiputera pada tahun 1927 dalam sidang tanggal 16 Mei 1927, dengan Mr. A. Neytzell de Wilde sebagai Ketua Sidang dan Andries Cornelis Dirk de Graeff sebagai Gubernur Jenderal.
  - Ia tergabung dalam Komisi Persiapan (*Commissie van voorbereiding*) yang bertugas untuk menyiapkan penyelidikan rancangan ordonansi peninjauan kembali ketentuan kepemilikan utuh dan rancangan undang-undang pencegahan pajak ganda.
  - Ia juga mengajukan beberapa mosi, antara lain mosi penggabungan departemen urusan perang dan angkatan laut, penerapan reformasi pemerintahan di Sumatra (*buitengewesten/daerah di luar Jawa dan Madura*), memperkuat Korps Barisan di Madura, penghapusan *exorbitante rechten*, penghapusan *poenale sanctie*, perbaikan gaji pengawas sekolah dan kepala penilik sekolah, pergeseran pos untuk pengeluaran pembentukan jalur udara ke dalam anggaran tahun 1929, serta pembatasan durasi rapat di Volksraad.
  - Saat itu, Thamrin merupakan seorang *wethouder* (Badan Pengurus Harian) di Kotapraja Batavia yang bertempat tinggal di Weltevreden (pinggiran Batavia).

Thamrin diangkat untuk menggantikan posisi Dr. Sutomo dan bekerja sama dengan Kusumo Utoyo sebagai seniornya di Volksraad.

➤ Volksraad 1928-1929

- Thamrin sebagai anggota dalam persidangan tahun 1928-1929 yang dibuka pada 15 Mei 1928 oleh Gubernur Jenderal de Graeff dan Ketua Sidang de Wilde, bersama dengan sejumlah tokoh penting, seperti Teuku Nyak Arif dan Sam Ratulangi.
- Kelak, bersama Teuku Nyak Arief, Thamrin membentuk Fraksi Nasional dalam Volksraad.
- Kali ini, Thamrin menjadi anggota dari Komisi Penyelidikan Surat Kepercayaan Anggota yang Dipilih, yaitu Cipto Mangunkusumo (*Commissie voor het onderzoek van den geloofsbrief van het gekozen lid Cipto Mangunkusumo*) untuk menentang pemerintah memindahkan nasionalis veteran tersebut dari pembuangannya di Banda ke Batavia.

➤ Volksraad 1929-1930

- Pada periode 1929-1930, Thamrin kembali menjadi anggota dalam sidang yang diadakan pada 15 Juni 1929, diketuai oleh J.W. Meyer Ranneft, dalam Komisi Konsultasi (*Commissie van overleg*) yang bertugas dalam menghubungkan antara Volksraad dengan pemerintah, dan jika dibutuhkan dapat memberi saran pada ketua.
- Selain itu, pada periode persidangan yang sama seperti tersebut di atas, Thamrin mengajukan beberapa mosi, antara lain:
  - Bersama Suroso dan Dwijosewoyo, mengajukan penghapusan Pasal 153 ter dan Pasal 161 bis dari UU Pidana yang mengekang hak bicara, berkumpul, dan berkegiatan (status ditarik).
  - Bersama Ratulangi, Soangkupon, Suroso, dan Mochtar, menyampaikan mosi yang membatasi perjalanan ke daerah Manado (status diterima).
  - Bersama Suroso dan Ratulangi mengajukan penghapusan Hak Istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante rechten*) (status tidak diketahui).

➤ Pembentukan Fraksi Nasional:

- Pada 27 Januari 1930, Thamrin berpidato di hadapan sidang Volksraad dan membawa gagasan tentang *Nationale Fractie* atau Fraksi Nasional yang bermaksud untuk mewujudkan Indonesia merdeka dalam waktu dekat. Fraksi terdiri atas sepuluh orang, antara lain: Kusumo Utoyo (*Midden-Java/Jawa*

Tengah), Dwijosewoyo (*Vorstenlanden*/Daerah Kesultanan), Datuk Kayo (*Westkust van Sumatra*/Pantai Barat Sumatra), Mochtar Prabu Mangkunegara (Palembang), Nyak Arif (*Atjeh*/Aceh), Soangkupon (*Oostkust van Sumatra*/Pantai Timur Sumatra), Pangeran Ali (Borneo), Sutadi (*Midden-Java*/Jawa Tengah), Suroso (*Oost-Java*/Jawa Timur), dan M.H. Thamrin (*West-Java*/Jawa Barat) sendiri.

- Fraksi ini mengecam penggeledahan rumah anggota PNI, menuntut pembatalan *Wilde-School Ordonantie* (Peraturan Sekolah Liar, dicabut pada 1 April 1934). Fraksi Nasional mengubah tujuannya dari “*de zoo spoedig mogelijke zelfstandigheid van Indonesia*” (mandiri) menjadi “*de zoo spoedig mogelijke onafhankelijkheid van Indonesia*” (merdeka). Situasi politik menjadi semakin tegang dengan tidak diakuinya Thamrin sebagai *locoburgemeester* (wakil walikota) di Dewan Kota Batavia.
- Sedikit terkait alasan Thamrin membentuk Fraksi Nasional, Thamrin merasa bahwa kedepannya akan semakin sulit dan rumit jika pihak Bumiputera terus mengharapkan hasil dari etika moral kolonial dalam memajukan kesejahteraan penduduk dan tanah jajahannya, sehingga ia mencari jalan yang lebih realistis, yaitu dengan membangun kepercayaan pada kekuatan diri sendiri yang pada akhirnya dapat mencapai konsesi di berbagai sektor.
- Faktor dibentuknya Fraksi Nasional:
  - Sikap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap gerakan politik di luar *Volksraad*, terutama terhadap PNI.
  - Anggapan dan perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap semua gerakan nasional baik yang anti maupun yang pro terhadap kooperasi, terutama dalam peristiwa penggeledahan tokoh-tokoh PNI yang juga dilakukan terhadap anggota-anggota perkumpulan yang bersifat moderat, dan bahkan yang mau berkooperasi.
  - Didirikannya *Vaderlandsche Club* (VC) pada tahun 1929 sebagai protes terhadap “*ethisch beleid*” Gubernur Jenderal de Graef.
- Fraksi Nasional merupakan langkah konkret bagi kaum pribumi di *Volksraad* yang didominasi orang Belanda untuk benar-benar menyuarakan dan memperjuangkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda.



Foto 10. Foto M.H. Thamrin dalam Kongres Kedua PPPKI di Surabaya c. 1929

- o Melalui Fraksi Nasional, Thamrin dan kawan-kawan berusaha untuk memperingatkan Volksraad akan potensi perubahan kondisi di masa datang bagi kaum pribumi. Tindakannya memang dinilai sebagai reaksi tidak sabaran oleh pihak kolonial (tindakan yang kekanak-kanakan), namun sesungguhnya nasib ekonomi dan sosial yang terus memburuklah yang mendorong mereka.



Foto 11. Foto kunjungan Thamrin dan Kusumo Utoyo ke Medan sebagai Fonds Nasional.

- Volksraad 1930-1931
  - Sidang berikutnya yang diikuti Thamrin adalah pada periode 1930-1931 yang dibuka pada tanggal 16 Juni 1930 dan kembali diketuai oleh Ranneft, tergabung dalam Komisi Untuk Surat-surat Permohonan (*Commissie voor de verzoekschriften*) yang bertugas untuk menangani laporan dari surat permohonan yang ditujukan pada Volksraad dan *College van Gedelegeerden*, Komisi Persiapan (*Commissie van voorbereiding*), dan Komisi Konsultasi (*Commissie van overleg*).
  - Beberapa mosi diajukannya, seperti tentang pengenalan pelajaran bahasa Belanda di sekolah standar (status ditahan) dan pencabutan *poenale sanctie* di seluruh wilayah luar Jawa dan Madura dalam jangka waktu lima tahun (status ditolak).
- Volksraad 1931-1932
  - Memasuki periode berikutnya, Thamrin masih tergabung sebagai anggota sidang yang dibuka pada 15 Juni 1931 dengan ketua yang sama, yaitu Ranneft. Ia kembali masuk dalam Komisi Untuk Surat-surat Permohonan (dengan pengganti Van Lonkhuyzen), Komisi Konsultasi (pengganti), Komisi Persiapan, serta Komisi Penasihat (*Commissie van advies*). Pada sidang kali ini, Thamrin menjabat sebagai Anggota *College van Gedelegeerden* yang bertempat tinggal di Batavia, dan terhitung menjabat sejak 15 Juni 1931.
  - Selain itu, ia juga tergabung dalam komisi untuk *College van Gedelegeerden*, yaitu pada *Tweede Commissie* (Komisi Kedua) yang bertugas dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan *Landbouw, Nijverheid, en Handels, Burgerlijke Openbare Werken, Gouvernements Bedrijven, Justitie, dan Onderwijs en Eerdienst*, diketuai oleh De Hoog; serta *Bijzondere Commissie* (Komisi Khusus) yang mempersiapkan penelitian rancangan ordonansi hingga perubahan peraturan organisasi yudisial.
  - Dalam periode sidang ini, Thamrin mengajukan amandemen terkait rancangan peraturan pemberian uang pensiun pada pejabat lokal non-Eropa dan rancangan peraturan perubahan penambangan timah di Bangka menjadi perusahaan negara; sementara mosi yang diajukan antara lain tentang pengenalan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran di sekolah umum (status ditunda), tentang pengajuan pengangkatan orang Indonesia dalam *College van Burgemeester en Wethouder* di sejumlah kotapraja (status ditolak).

- Pada sidang tahun 1931-1932, Thamrin mengajukan mosi tentang pencabutan bea tambahan (*opceten*) untuk beberapa jenis barang impor di sepanjang tahun 1932-1933, yang dianggapnya tidak adil jika dijadikan sebagai tanggungan berat bagi penduduk pribumi (status ditolak).
- Sementara dalam persidangan pada 3 Februari 1932, Thamrin berpidato dan menyampaikan empat pandangan, yaitu:
  - Krisis ekonomi disebabkan oleh konsumsi dalam negeri yang rendah karena kesalahan struktur politik dan ekonomi dunia.
  - Kebangkitan kesadaran politik dan ekonomi di masyarakat kolonial dan semi-kolonial untuk melepaskan diri dari produksi barat agar menghentikan perkembangan pemiskinan oleh intensifnya penghisapan.
  - Tidak berubahnya struktur politik dan ekonomi kolonial, sehingga krisis bertahan lama atau bahkan permanen.
  - Hanya politik yang dapat mengubah konstitusi secara menyeluruh sebagai bentuk pemecahan krisis yang cepat dan tepat.



Foto 12. Foto M.H. Thamrin di Volksraad bersama anggota sidang c. 1935.

- Volksraad 1938-1939
  - Pada Juli 1938, atas nama anggota Fraksi Nasional, Thamrin menyatakan bahwa ia hanya akan menggunakan bahasa Melayu dalam menyampaikan pidato-pidatonya di Volksraad, sebagai contohnya pidato pada 12 Juli 1938

yang berjudul *Kebijaksanaan Diwaktue Krisis* dengan merujuk pada hak-hak yang diberikan pemerintah kolonial pada tahun 1918.

- o Penolakan dan kegagalan Petisi Sutarjo merupakan pukulan hebat bagi kaum pergerakan yang beraliran moderat, sehingga akhirnya dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada 21 Mei 1939 oleh Thamrin, yang mewadahi organisasi-organisasi persatuan untuk secara terbuka menuntut Indonesia Berparlemen. GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII. Thamrin memimpin GAPI bersama Amir Syarifuddin dari Gerindo dan menuntut "Indonesia Berparlemen".
- o Pada 15 Agustus 1939, Thamrin mengajukan mosi pada sidang Volksraad yang menuntut penggantian kata "*Nederlandsch-Indie*" dan "*Inlander*" dalam perundang-undangan menjadi "*Indonesia*", "*Indonesier*", dan "*Indonesisch*". Selanjutnya, diadakan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pada 18 Januari 1940 untuk mempropagandakan semangat Indonesia Berparlemen dengan cara membentuk komite, tempat studi, serta arak-arakan umum bersama dengan Abikusno dan Amir Syarifuddin.

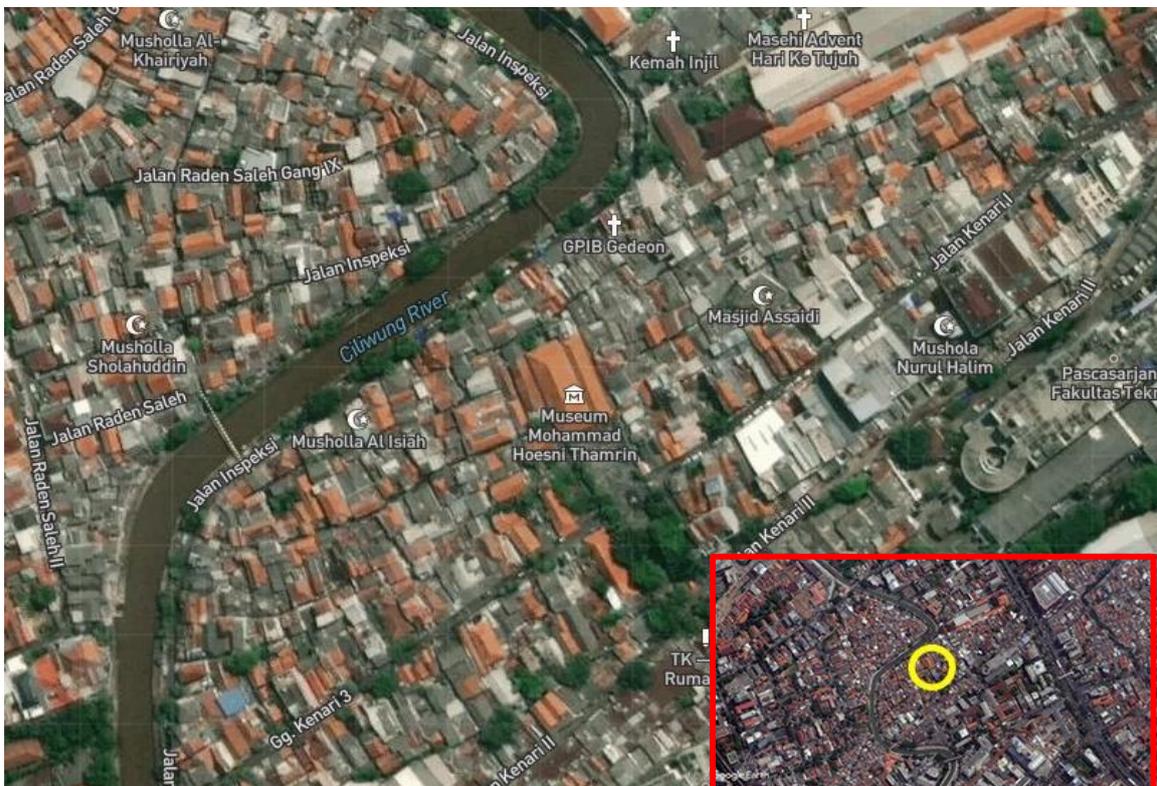
Pada 1934, Thamrin mengemukakan pendapatnya tentang penetrasi atau pengaruh Jepang di Hindia Belanda, yang mengarah pada dituduhnya ia sebagai simpatisan Jepang. Hal tersebut termasuk pula pada penyampaian istilah "DJINTAN" (*Djendral Japan Ini Nanti Toeloeng Anak Negeri*). Parindra, di mana Thamrin adalah bagian dari partai tersebut, disinyalir berupaya untuk bekerja sama dan berkorespondensi dengan pihak Jepang, yang pada akhirnya membuat Thamrin dijadikan tahanan rumah oleh pemerintah kolonial (Rohmadi & Warto, 2019).

Di akhir perjuangannya, Thamrin dianggap melakukan kerja sama dengan pihak Jepang. Senin, 6 Januari 1941, rumahnya digeledah, dan ia pun dikenai tahanan rumah oleh pemerintah kolonial. Pada saat itu, Thamrin sedang sakit dan dalam keadaan demam, dengan bantuan medis yang minim, sehingga pada akhirnya meninggal dunia pada 11 Januari 1941.

Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keterangan Pengangkatan Mohammad Hoesni Thamrin No. 175 Tahun 1960 sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang kemudian pada tahun 2009 gelar pahlawan itu disamaratakan menjadi Pahlawan Nasional.

### 3.3. Gambaran Umum Gedung Museum MH. Thamrin

Gedung Museum M. H Thamrin awalnya dibangun oleh seorang Belanda bernama Meneer de Has. Awalnya gedung tersebut digunakan untuk pemotongan hewan dan tempat menampung berbagai buah dari Australia sebelum didistribusikan ke berbagai tempat di Batavia. Baru pada 12 Maret 1927, gedung tersebut dibeli oleh M. H Thamrin dari de Has. Pada tahun 1928, gedung diserahkan oleh M. H Thamrin untuk mengakomodasi kegiatan kaum pergerakan kebangsaan yang tergabung dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).



Peta 1. Lokasi Museum MH. Thamrin. Pada gambar insert, ditandai dengan lingkaran warna kuning.

Selain penting dalam perjuangan kemerdekaan, gedung ini juga digunakan untuk kegiatan belajar dengan diadakannya kursus-kursus seperti Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Sejarah, Etnologi, Kemasyarakatan, dan ceramah-ceramah. Gerakan pendidikan tersebut merupakan bagian dari Perguruan Rakyat, yang

diprakarsai oleh Dr. Mr. Moh. Nazief pada 11 Desember 1928, dan mulai aktif menjalankan fungsinya pada 8 Januari 1928. Beberapa nama terkenal yang turut hadir sebagai pengajar, misalnya Ki Hajar Dewantara, Dr. Sarjito, Dr. Purbacaraka, dan H. Agus Salim. Sementara salah satu murid yang cukup terkenal adalah Ismail Marzuki.

Pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 1929, gedung bersejarah ini digunakan sebagai tempat Kongres Partai Nasional Indonesia (KPNI) I dan II. Pada tahun berikutnya, acara pementasan Sandiwara yang bertujuan membangkitkan semangat kepahlawanan para pejuang Indonesia digelar di gedung tersebut. Setelah PPPKI bubar, gedung ini dijadikan markas Partai Rakyat Indonesia (PARINDRA) dan beberapa kali mengadakan kongres di gedung ini.

Pada tahun 1935, gedung ini menjadi tempat dilaksanakannya Kongres Persatuan Arab di Indonesia. Empat tahun kemudian pada tanggal 21 Mei 1939, tempat ini menjadi saksi dilakukan pembentukan Organisasi Politik bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Antara tahun 1960-1964, gedung ini kembali dijadikan sebagai tempat pendidikan, tepatnya kepomong-prajaan. Tahun 1966-1977 pada malam hari gedung ini digunakan sebagai tempat kuliah Universitas Jakarta dan siang hari sekolah SMA Arena Siswa, gedung ini terus digunakan oleh SMA Arena Siswa hingga tahun 1984.

Mengingat nilai sejarah yang dimiliki oleh gedung ini, pada tahun 1972 melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. CB II/I.12.720 gedung ini ditetapkan menjadi bangunan bersejarah yang dilindungi. Peresmian gedung sendiri baru dilakukan pada 11 Januari 1986, sebagai Gedung M.H. Thamrin.

Tanggal 29 Agustus 1994 oleh Ahli Waris M.H. Thamrin, Ny. Dee Zubaidah Dimmyati Thamrin, gedung M.H Thamrin dihibahkan ke Pemerintah DKI Jakarta dan selanjutnya dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta dan diberi nama Museum M.H. Thamrin melalui Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1438 Tahun 1994. Saat ini gedung Museum M.H Thamrin berada dalam keadaan yang cukup terawat, dengan bangunan yang digunakan sebagai ruang pameran, ruang audio visual, dan perkantoran bagi pegawai museum.

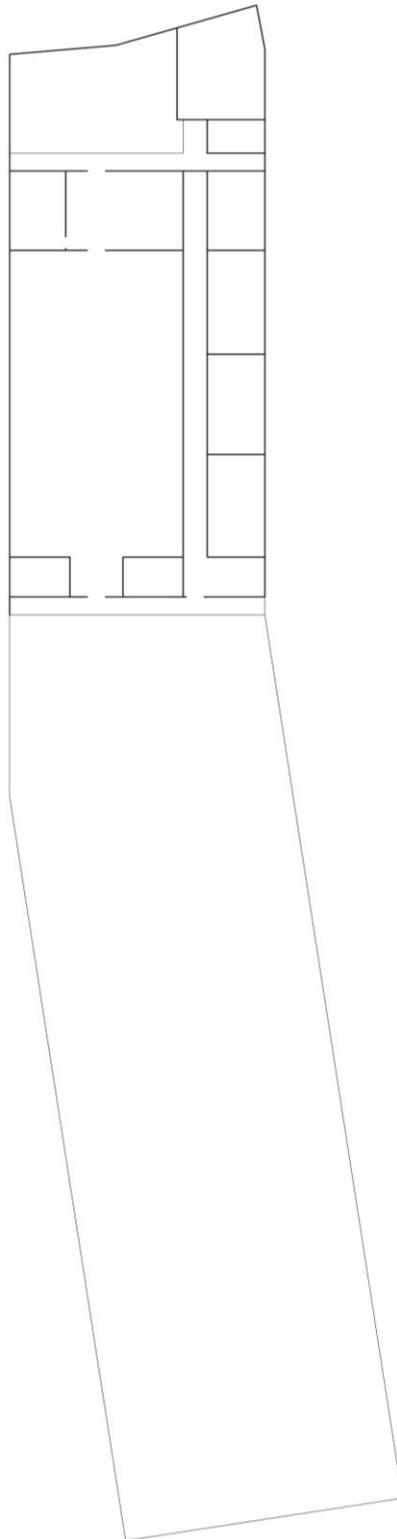


Foto 13. Museum MH. Thamrin (tampak depan)

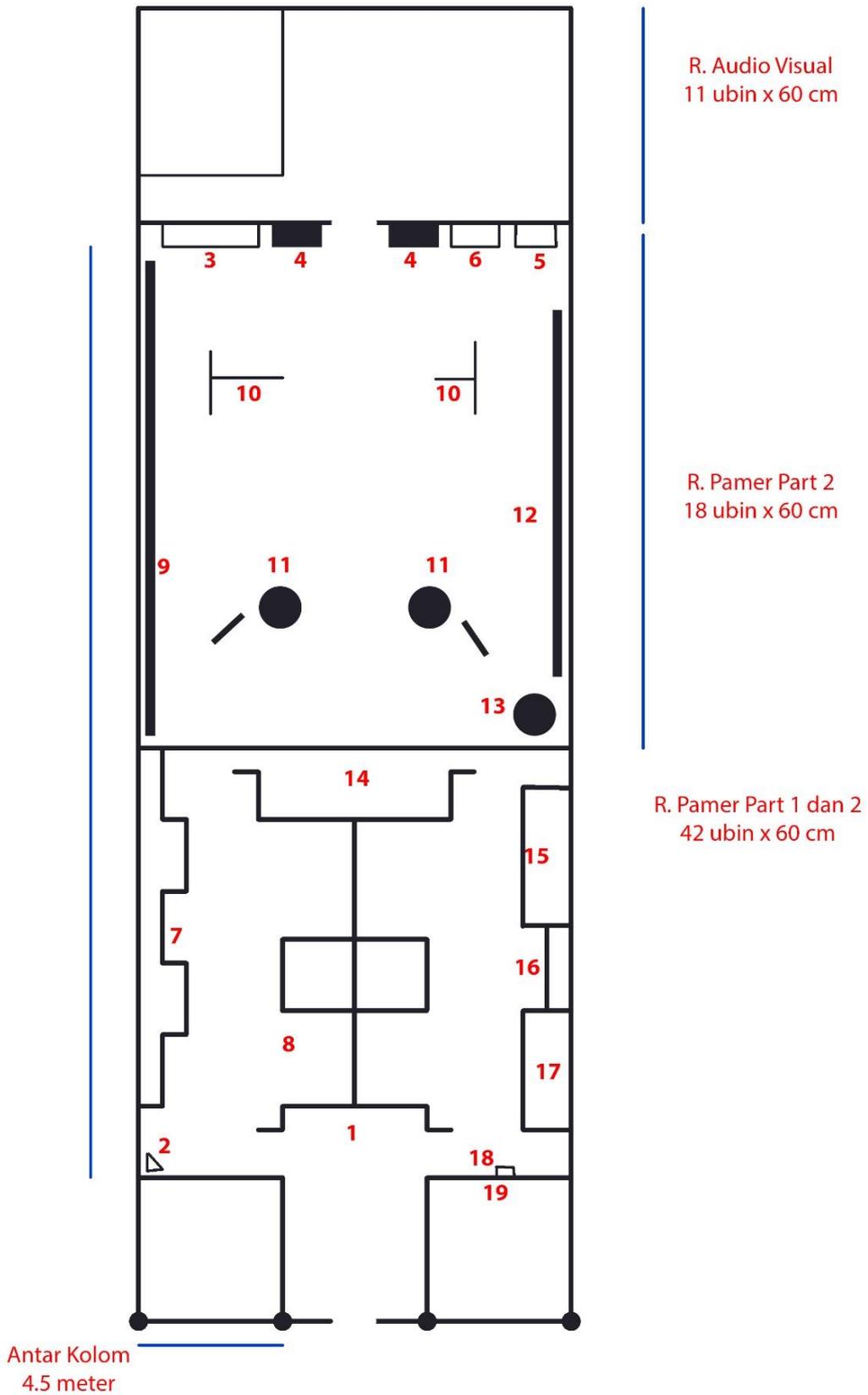
Gedung Museum M.H Thamrin sendiri merupakan bangunan kolonial dengan gaya *Nieuwe Indische* yang populer berkembang di tahun 1920an. Bangunan gedung M. H. Thamrin memiliki denah persegi panjang dan terdiri dari dua bangunan. Bangunan yang kini digunakan sebagai museum (lebih besar) dan bangunan kantor. Atap bangunan gedung sendiri berbentuk *hipped roof* dan pada bagian fasad terdapat tambahan berupa atap yang miring ke arah depan. Pada jendela dan pintu terdapat kisi-kisi (jalusi) untuk memudahkan pertukaran udara. Selain nilai sejarah yang sangat penting, bangunan gedung museum M.H Thamrin juga memiliki nilai penting lain, yaitu mewakili gaya arsitektur yang menunjukkan perkembangan gaya arsitektur yang khas di Indonesia.

Selain ruang pameran, museum ini juga memiliki beberapa fasilitas, antara lain.

1. Ruang Pertemuan
2. Ruang Audio Visual
3. Perpustakaan
4. Area Parkir



Gambar 14. Denah Skematik Area Publik di Museum MH. Thamrin.



Gambar 15. Denah Skematik Area Publik di Museum MH. Thamrin.



1. Diorama Kongres



2. Patung Torso MH Thamrin



3. Diorama



4. Alat Musik



4. Alat Musik



5. Diorama Rumah Sawah Besar



6. Biografi MH. Thamrin



7. Mebel 1



7. Mebel 2



8. Partisi plus sepeda



9. Foto tokoh



10. Panel Informasi Partisi



11. Alat Musik (tanjidor dan rebana)



12. Panil Sejarah



13. Meja makan



14. Ruang Tamu



15. Delman



16. Dipan



17. Kereta Jenazah



18. Maket

## BAB IV TATA PAMER MUSEUM MH. THAMRIN

### 4.1. Alur Cerita Pameran Museum

Secara umum, isi pameran Museum MH. Thamrin berdasarkan hasil kajian museologis dibagi menjadi dua tema besar: Kisah hidup dan kiprah M.H. Thamrin dan riwayat bangunan Museum MH. Thamrin. Secara ringkas, kedua teman tersebut akan dibuat dalam kerangka berpikir, sebagai berikut:

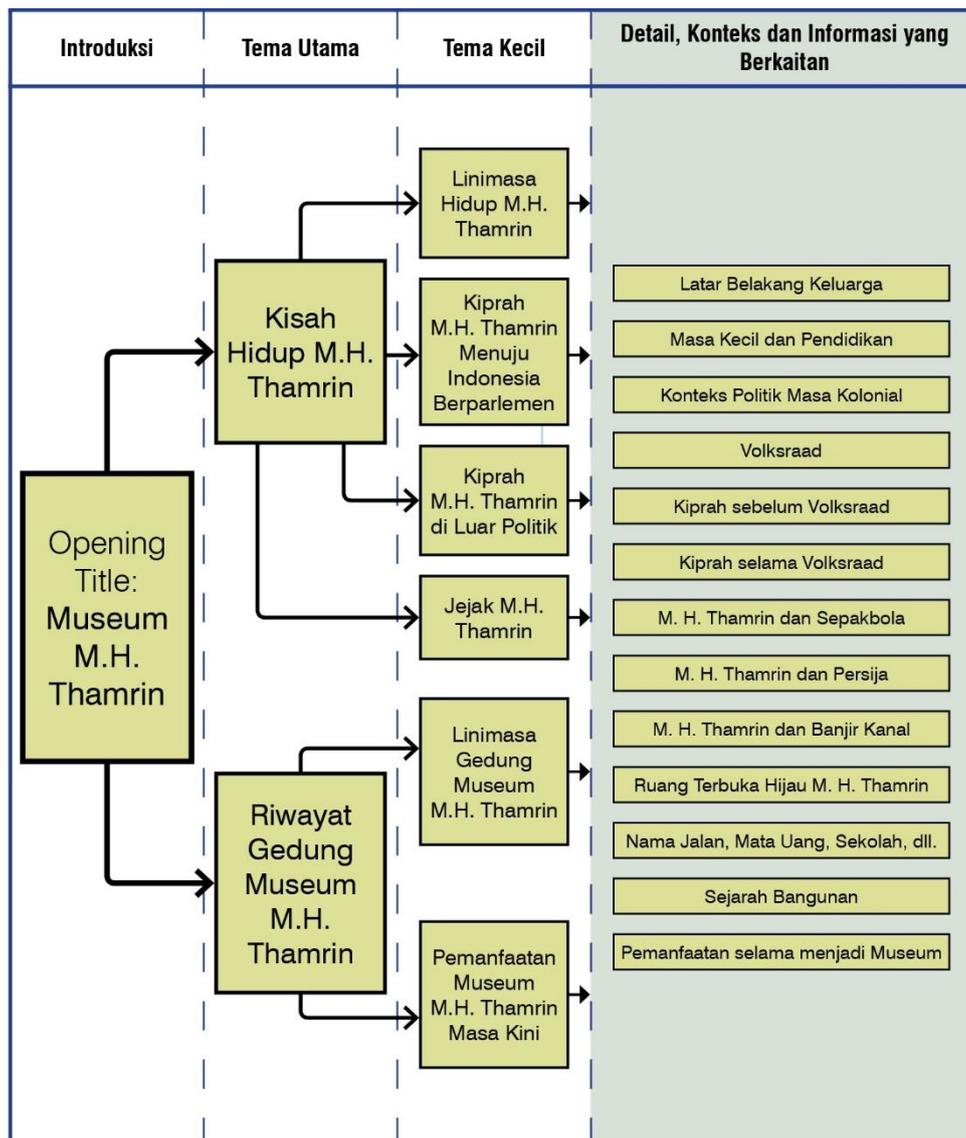


Diagram 3. Kerangka Berpikir Pameran Museum MH. Thamrin.

Pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa ada dua tema besar, enam tema kecil, dan beberapa detail dan konteks/informasi yang berkaitan. Semua gagasan tersebut disusun dalam alur sebagai berikut:

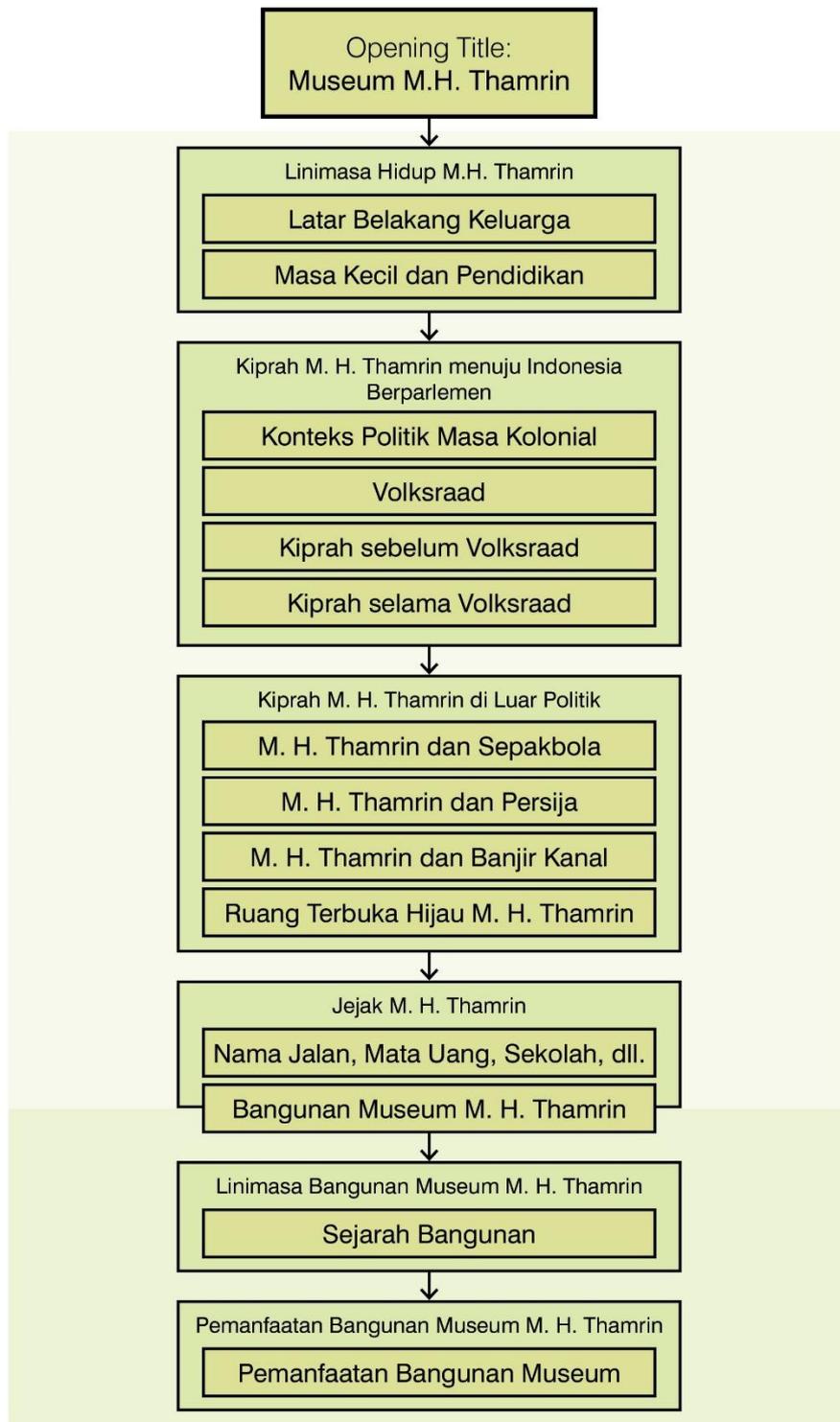


Diagram 4. Alur Cerita Pameran Museum MH. Thamrin.

#### 4.2. Konsep Tata Pamer Museum MH. Thamrin

Alur cerita di atas lalu dimasukkan ke dalam matriks pameran. Matriks pameran adalah uraian rinci yang menjadi referensi dalam perencanaan mengumpulkan koleksi dan mengadakan produksi media pamer yang diperlukan, sebagai berikut:

No	SUBTEMA	ISI	MEDIA PAMER	LOKASI
<b>INTRODUKSI</b>				
1	Pendahuluan	Pengenalan mengenai Museum M. H. Thamrin dan Museum Kesenjangan Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panil Informasi</li> <li>• Paket multimedia</li> </ul>	Area Penerima
<b>KISAH HIDUP M. H. THAMRIN</b>				
2	Linimasa Kehidupan M. H. Thamrin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar Belakang Keluarga M. H. Thamrin</li> <li>• Masa Kecil dan Pendidikan M. H. Thamrin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panil Informasi</li> <li>• Paket multimedia</li> <li>• Koleksi pemberian Keluarga</li> </ul>	Ruang Pertama
3	Kiprah M. H. Thamrin menuju Indonesia Berparlemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konteks Politik Masa Hindia Belanda Pasca Politik Etis</li> <li>• Volksraad</li> <li>• Kiprah M. H. Thamrin sebelum menjadi anggota Volksraad</li> <li>• Kiprah M. H. Thamrin saat menjadi anggota Volksraad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panil Informasi</li> <li>• Diorama</li> <li>• Paket multimedia</li> <li>• Permainan/peraga</li> </ul>	Ruang Kedua
4	Kiprah M. H. Thamrin di Luar Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. H. Thamrin dan Sepak Bola</li> <li>• M. H. Thamrin dan Persija</li> <li>• M. H. Thamrin dan Banjir Kanal</li> <li>• RTH M. H. Thamrin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panil Informasi interaktif</li> <li>• Diorama</li> <li>• Paket multimedia</li> </ul>	Ruang Ketiga
5	Jejak M. H. Thamrin	Ragam peninggalan M. H. Thamrin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panil Informasi Interaktif</li> <li>• Paket multimedia</li> <li>• Permainan/peraga</li> </ul>	Ruang Keempat
<b>RIWAYAT GEDUNG MUSEUM MH. THAMRIN</b>				
6	Linimasa Bangunan Museum M. H. Thamrin	Sejarah Bangunan Museum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diorama</li> <li>• Paket multimedia</li> </ul>	Ruang Kelima
7	Pemanfaatan Bangunan Museum M. H. THamrin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Gedung Museum</li> <li>• Masa Depan Museum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panil Informasi interaktif</li> <li>• Diorama</li> <li>• Paket multimedia</li> </ul>	Ruang Keenam

## REFERENSI

- Giliomee, H. (2003). *The Afrikaner: Biography of a people*. London: Hurst & Company.
- Hering, B.B. (2003). *M.H. Thamrin: Membangun Nasionalisme Indonesia* (terj. oleh H. Sutejo). Jakarta: Hasta Mitra.
- Ihsan, A.Z. & Soeharto, P. (1981). *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok; Capita Selecta Pertama: Kumpulan Tulisan Asli, Lezing, Pidato Pergerakan Kebangsaan 1913–1938*. Jakarta: Jayasakti.
- Rohmadi, N. & Wartyo. (2019). "Volksraad (People Council): *Radical Concentration* Political Arena and National Fraction, 1918-1942", *Humaniora*, Vol. 31 No. 2, p. 166-176.
- Sinaga, D.A. (2014). "Perjuangan Mohammad Hoesni Thamrin sebagai Perintis Kemerdekaan Indonesia (1919-1941)", Tesis Magister Program Sarjana Universitas Negeri Medan.
- Siswantari. (2019). "Perhimpunan Kaoem Betawi 1923-1942: Betawi dan Keindonesiaan", Disertasi Doktor Program Pascasarjana FIB UI.
- Versnel, H. & Colombijn, F. (2015). "Rückert and Hoesni Thamrin, Bureaucrat and Politician in Colonial Kampong Improvement" dalam F. Colombijn & J. Coté, *Cars Conduits, and Kampongs*. Leiden: Brill.

### Arsip:

- Handelingen van de Volksraad, Zittingsjaar 1927-1928*
- Handelingen van de Volksraad, Zittingsjaar 1928-1929*
- Handelingen van de Volksraad, Zittingsjaar 1929-1930*
- Handelingen van de Volksraad, Zittingsjaar 1930-1931*
- Handelingen van de Volksraad, Zittingsjaar 1931-1932*

### Internet:

- Djulianto Susantio. Jelajah Malam Sambil Berdiskusi di Museum MH Thamrin 23 April 2018 05:52 <https://www.kompasiana.com/djuliantosusantio/5adc61ed5e13732e0144caa2/jelajah-malam-sambil-berdiskusi-di-museum-mh-thamrin>
- Rizki Pudjianto. Pameran Ini Kampung. 14 Desember 2018. <https://rujak.org/pameran-kampung-kota-kita/>
- Nur Ichsan. Jakarta Museum Marathon Smart Race 2019 Inovasi Promosikan Museum Di Ibukota. Sabtu, 6 Juli 2019 00:48. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/06/jakarta-museum-marathon-smart-race-2019-inovasi-promosikan-museum-di-ibukota>.